

Peran Mukti Ali dalam Pengembangan Toleransi Antar Agama di Indonesia

Pendahuluan

Agama mengajarkan ketenangan, keharmonisan, kedamaian dan tentunya menimbulkan sinergi positif dalam kehidupan beragama. Namun, tak jarang di temui ada konflik, perselisihan, bahkan kekerasan yang muncul karena agama atau mengatasnamakan agama. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, adakalanya konflik terjadi antar sesama agama yang memiliki sekte berbeda.

Terjadinya perbedaan pendapat mengenai aliran teologi dalam umat telah disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadiNya, *“Umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tetapi hanya satu golongan yang akan selamat, golongan yang lain akan binasa”*. Tentu timbul pertanyaan golongan manakah yang selamat itu? Rasulullah tidak memberikan jawaban dengan menunjuk golongan tertentu tetapi dengan memberikan kriteria golongan yang selamat tersebut. *“(yaitu) orang-orang yang mengikuti sunnah dan al-jama’ah”*.

Riwayat hadis diatas memberikan gambaran umum apa yang selalu terjadi di dalam umat Islam. Klaim kebenaran dan hak pemegang kebenaran sejati muncul dari setiap golongan dan seringkali diikuti dengan pertumpahan darah. Perenungan yang mendalam mengenai teks hadis dan fenomena yang terjadi seharusnya memberikan jalan keluar dari konflik yang berlarut-larut hingga kini. Secara faktual hadis diatas tidak tunjuk hidung dengan menunjuk golongan mana yang terselamatkan itu?. Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa

Oleh : Khairah Husin

Agama sebagai sasaran kajian penelitian sudah banyak dilakukan oleh para sarjana disiplin ilmu. Mereka melakukan penelitian terhadap berbagai aspek dari agama, baik aspek ide maupun aspek perwujudan dalam kenyataan. Dimulai dari keyakinan dan ajaran yang dimiliki oleh suatu agama hingga pengaruh agama pada kehidupan masyarakat pemeluk agama tersebut. Kalau yang dimaksud metode dalam ilmu perbandingan agama adalah cara untuk memperoleh dan mamahami kebenaran agama dari realitas empiris, atau lebih tepatnya “kebenaran ilmiah agamis”, maka pendekatan tiada lain adalah suatu sikap ilmiah (persepsi) dari seorang yang harus ditunjukkan untuk menemukan kebenaran ilmiah yang hendak diperoleh. Dengan demikian pendekatan sifatnya umum. Dalam suatu pendekatan tertentu dapat digunakan bermacam-macam metode, umpamanya seorang Sosiolog akan mengkaji agama pasti akan menerapkan pendekatan metode-metode sosiologis. Begitu pula Sejarawan, Antropolog, Fenomenolog, dan lain-lain akan menerapkan pendekatan dan metode sesuai dengan latar belakang keahliannya.

Maka sasaran ideal dari beberapa pendekatan adalah memperoleh interelasi yang sistematis dari fakta-fakta agama, dan bertujuan untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta tersebut dengan menggunakan kesangsian sistematis. Pendekatan

(1) adanya perpecahan dalam umat, (2) kriteria golongan yang selamat (3) keharusan untuk mengikuti *al-sunnah* dan *al-jam'ah* dan (4) *al-sunnah* dan *al-jama'ah* adalah apa yang Nabi dan para sahabat jalankan.

Selain faktor eksternal yang menjadi pokok penyebabnya, ada juga faktor internal yang melatarbelakanginya. Padahal dalam setiap agama terdapat ajaran tentang kerukunan antar sesama. Untuk itu, agar tidak terjadi kesalahpahaman antar umat beragama perlu kiranya sebuah disiplin ilmu tentang agama-agama yang ada di dunia ini, dalam hal ini kita kenal dengan ilmu perbandingan agama.

Saat menjadi Menteri Agama RI (1971-1978) Prof. Mukti Ali mengagas model kerukunan antar-umat beragama untuk menciptakan harmonisasi kehidupan nasional. Terapi yang digagas Mukti Ali dan diimplementasikan melalui Departemen Agama tersebut, secara mendasar dilandasi oleh prinsip keadilan Islam yang mempercayai tiga hal penting, yakni; kebebasan hati nurani secara mutlak, persamaan kemanusiaan secara sempurna, dan solidaritas dalam pergaulan yang kokoh.

Yang lebih menonjol adalah konsepnya tentang agree in disagreement (setuju dalam ketidaksetujuan atau setuju dalam perbedaan) yang pertama kali dikemukakannya pada forum symposium di Goethe Institute, Jakarta, beberapa bulan sebelum ia diangkat menjadi menteri. Konsep inilah yang kemudian dikembangkannya lebih lanjut menjadi konsep 'Kerukunan Hidup Antar umat Beragama' di Indonesia.

Sepanjang hayatnya beliau dikenal sebagai intelektual Muslim yang tangguh, berwatak dan berpandangan luas, memiliki reputasi nasional dan internasional. Dia anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIP), anggota dewan riset internasional dan perintis organisasi Parlemen Agama Sedunia di New York. Dia orang pertama yang

keilmuan dalam meneliti agama mencoba mendeskripsikan dunia pemeluk agama secara apa adanya (das sein), bukan didasarkan semestinya secara normatif (das sollen). Dengan demikian, pendekatan keilmuan yang empiris ini menggunakan dan mengadaptasi pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu sosial dan budaya.

Dari sekian tokoh ilmu Perbandingan Agama, kebanyakan dari mereka merupakan ilmuwan Barat. Namun demikian ada juga beberapa tokoh perbandingan agama dari duni Islam, antara lain adalah Prof. Dr. H.A. Mukti Ali, Ibnu Hazm dan As-Syahrastani.

Sementara Ibnu Hazm Al Andalusy dan As-Syahrastani merupakan tokoh-tokoh Perbaga Muslim dari zaman klasik – zaman ketika Perbaga belum terbentuk sebagai studi ilmu yang mapan – maka Mukti Ali merupakan sedikit – bila bukan satu-satunya – di antara tokoh ilmuwan yang berkuat menekuni disiplin secara saintifik Perbaga di zaman modern. Maka di sinilah nilai penting dari tulisan ini.

Keywords: *Mukti Ali, Perbaga, Kerukunan*

membuka jurusan Perbandingan Agama di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dikukuhkan sebagai Guru Besar ilmu Perbandingan Agama, barangkali satu-satunya di Indonesia. Dia memperkenalkan pendekatan religion scientific atau scientific-cum-doctrinair. Meski demikian, ia menolak disebut sebagai 'bapak ilmu Perbandingan Agama di Indonesia'.

Riwayat Hidup Kehidupan awal

Mukti Ali memiliki nama kecil Soedjono (Sujono), namun sumber lain ada yang

menyebutkan Boedjono (Bujono).¹ Sedangkan nama Abdul Mukti Ali sendiri ia dapat dari pemberian K.H. Hamid Pasuruan ketika menjadi gurunya.² Ia adalah anak kelima dari tujuh bersaudara.³ Mukti Ali hidup di kalangan keluarga yang berkecukupan. Ayahnya bernama Idris, atau Haji Abu Ali (nama yang digunakan setelah menunaikan haji) adalah seorang pedagang tembakau yang cukup sukses. Sedangkan ibunya bernama Mutiah, atau Hj. Khodijah (nama yang digunakan setelah menunaikan haji) adalah seorang saudagar kain.⁴

Latar belakang pendidikan

Pendidikan pesantren

Meskipun Haji Abu Ali memiliki pendidikan yang sangat rendah, yakni hanya diperolehnya dari mengaji kitab di pesantren di Cepu, namun ia termasuk orang tua yang sangat memikirkan pendidikan anaknya.⁵ Pada usia delapan tahun, Mukti Ali menempuh pendidikan formalnya dengan masuk HIS (*Hollandsch Inlandsche School*), sekolah milik Pemerintah Hindia Belanda setingkat Sekolah Dasar. Di samping itu, ia juga mengaji (belajar agama Islam) di Madrasah Diniyah (Sekolah Islam) di Cepu, yang kegiatan belajarnya berlangsung sore harinya.⁶

Setelah menyelesaikan pendidikannya di HIS dan mendapat sertifikat pegawai pemerintah Belanda (*Klein Ambtenar Examen*), Mukti Ali melanjutkan dikirim ke Pondok Pesantren di Cepu untuk belajar al-Qur'an kepada Kiai Usman. Di bawah asuhan Kiai Usman yang terkenal tegas, Mukti Ali belajar membaca al-Qur'an dengan fasih dan *tartil* menurut kaidah ilmu tajwid.⁷

Pada pertengahan tahun 1940, Mukti Ali lalu dikirim ayahnya untuk belajar di Pondok Pesantren Termas, Pacitan, di bawah asuhan K.H. Dimiyati dan puteranya K.H. Abdul

Hamid Dimiyati. Ia intensif mempelajari berbagai kitab klasik seperti *Nabwul Wadlih*, *Balaghatul Wadhibah*, *Jurumiyah*, *Alfiyah*, *Taqrib*, *Iqna'*, 'Mustalah Hadis', 'Jam'ul Jawami', dan lain-lain.⁸ Di pesantren tradisional ini Mukti Ali mengaji di bawah asuhan kiainya dan banyak belajar dan berdiskusi dengan para seniornya. Di antara para senior Mukti Ali tersebut adalah K.H. Abdul Hamid (asal Lasem yang kemudian menetap di Pasuruan) dan K.H. Ali Ma'sum (Rais Aam Syuriah PBNU 1981-1984). Di Pesantren ini juga Mukti Ali bersama K.H. Ali Ma'sum sempat merintis berdirinya madrasah, yang kemudian K.H. Ali Ma'sum menjadi kepala sekolah dan Mukti Ali menjadi wakilnya.⁹

Setelah selesai belajar agama di Pesantren Termas, Mukti Ali melanjutkan pendidikan agamanya di Pesantren Hidayah, Saditan, Lasem, Rembang di bawah asuhan K.H. Maksun, ayah dari K.H. Ali Ma'sum, sahabat dan gurunya di pesantren Termas. Meskipun kedua pesantren yang pernah ia singgahi untuk belajar tersebut berbasis Nahdlatul Ulama, namun Mukti Ali tumbuh dan berkembang menjadi ulama intelektual dan ulama pembaharu yang berpengaruh.

Pendidikan akademik

Setelah menuntaskan pendidikan agamanya di berbagai pesantren, Mukti Ali pergi ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Islam (STI) yang saat itu baru saja berdiri. Ia memutuskan Fakultas Agama sebagai pilihannya. STI inilah yang kelak dikenal sebagai Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.¹⁰

Pada tahun 1950, Mukti Ali meneruskan perjalanannya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Selanjutnya, ia memutuskan untuk pergi ke Karachi, Pakistan. Dengan kemampuan bahasa Arab, Belanda, dan Inggris yang baik, Mukti Ali diterima di

program sarjana muda di Fakultas Sastra Arab, Universitas Karachi. Ia mengambil program Sejarah Islam sebagai bidang spesialisasinya.¹¹

Lima tahun kemudian, Mukti Ali mampu menamatkan program tingkat sarjana mudanya sekaligus melanjutkan program Ph.D di universitas yang sama. Pada bulan Agustus 1955, ia tiba di Montreal, Kanada, untuk melanjutkan belajarnya di Universitas Mc Gill dengan mengambil spesialisasi Ilmu Perbandingan Agama.¹²

Prof. Dr. H.A. Mukti Ali lahir di Cepu, 23 Agustus 1923. Semasa beliau masih kecil Sejak berumur delapan tahun, beliau mengenyam pendidikan Belanda di HIS. Baru setelah usianya menginjak 17 tahun beliau melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Termas, Kediri, Jawa Timur. Dengan kemampuannya dalam berbahasa Inggris beliau melanjutkan studi Islam ke Universitas Aligarh, India setelah perang dunia ke dua hingga mendapat gelar doktor sejarah Islam sekitar tahun 1952 dan kemudian beliau melanjutkan studi ke McGill University, Montreal, Kanada mengambil gelar Master of Arts (MA). Beliau juga pernah menjabat sebagai staf Kedubes RI di Karachi.

Hingga masa senjanya, beliau telah menulis puluhan buku, antara lain: *Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini; Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia; Muslim Bilali dan Muslim Mubajir di Amerika; Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan, Muhammad Iqbal; Ta'limul Muta'alim versi Imam Zarkasyi; Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam; Asal Usul Agama; dan Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*. Sejak itulah gagasan pembaruan Mukti Ali sebenarnya telah terlihat jelas. Beliau kerap kali menulis soal-soal gagasan pembaruan keislaman Muhammad Abduh dan Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.

Meskipun saat itu, beliau masih pada taraf membandingkan gagasan pembaruan kedua tokoh tersebut, namun benih-benih pembaruannya itu menjadi *entry point* penting kelak dalam perkembangannya. Mukti Ali cukup lihai dan cenderung mengintrodusir gagasan liberal Islam sedemikian rupa sehingga relatif tidak menimbulkan perlawanan dari kalangan yang tidak sepaham dengannya.

Mantan rektor IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta ini, dinilai sebagian kalangan telah memberi perlindungan kepada Ahmad Wahib atau Harun Nasution yang dianggap sebagai pemikir liberal. Baginya, membiarkan pemikiran liberal tumbuh akan lebih menguntungkan dan kondusif bagi perkembangan Islam modern. Karena itulah dapat dipahami bila tokoh ini tidak mengkritisi liberalisme Islam yang dikembangkan para intelektual. Sebagai sekretaris M. Natsir, ketua umum Masyumi waktu itu, juga membina dan mencoba merujuk hubungan baik antara NU dan Muhammadiyah, serta memelopori gerakan kerukunan antar-agama.

Tokoh yang bersih, jujur dan sederhana ini dilantik menjadi menteri agama pada 11 September 1971 menggantikan KH. M. Dachlan (Kabinet Pembangunan I) dan melanjutkan jabatan itu selama periode Kabinet Pembangunan II (1973-1978). Saat itulah beliau menggagas model kerukunan antar-umat beragama untuk menciptakan harmonisasi kehidupan nasional. Terapi yang digagas Mukti Ali dan diimplementasikan melalui Departemen Agama tersebut, secara mendasar dilandasi oleh prinsip keadilan Islam yang mempercayai tiga hal penting, yakni; kebebasan hati nurani secara mutlak, persamaan kemanusiaan secara sempurna, dan solidaritas dalam pergaulan yang kokoh. Setelah menyelesaikan tugas sebagai Menteri

Agama, Mukti Ali lalu diangkat menjadi anggota DPA. Tapi ia memutuskan tinggal di Yogyakarta agar kegiatan mengajar bisa kembali dilakukannya.

Pada tanggal 5 Mei 2004 beliau meninggal di Jogja pada umur 80 tahun. Beliau dikenang sebagai ahli perbandingan agama yang meletakkan kerangka kerukunan antarumat beragama di Indonesia sesuai dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika atau istilah yang sering dipakainya “Setuju dalam Perbedaan.” Ia juga terkenal sebagai cendekiawan muslim yang menonjol sebagai pembaharu pemikiran Islam melalui Kajian Keislaman (Islamic Studies).¹³

Gagasan dan pemikirannya ini tetap diteruskan oleh penggantinya, kala itu, Alamsyah Ratu Perwiranegara. Bahkan kemudian dikembangkan menjadi konsep “Trilogi Kerukunan” yang meliputi kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dan pemerintah.

Yang lebih menonjol adalah konsepnya tentang *agree in disagreement* (setuju dalam ketidaksetujuan atau setuju dalam perbedaan) yang pertama kali dikemukakannya pada forum symposium di Goethe Institute, Jakarta, beberapa bulan sebelum ia diangkat menjadi menteri. Konsep inilah yang kemudian dikembangkannya lebih lanjut menjadi konsep ‘Kerukunan Hidup Antar umat Beragama’ di Indonesia.

Sepanjang hayatnya beliau dikenal sebagai intelektual Muslim yang tangguh, berwatak dan berpandangan luas, memiliki reputasi nasional dan internasional. Dia anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), anggota dewan riset internasional dan perintis organisasi Parlemen Agama Sedunia di New York. Dia orang pertama yang membuka jurusan

Perbandingan Agama di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dikukuhkan sebagai Guru Besar ilmu Perbandingan Agama, barangkali satu-satunya di Indonesia. Dia memperkenalkan pendekatan *religion scientific* atau *scientific-cum-doctrinair*. Meski demikian, ia menolak disebut sebagai ‘bapak ilmu Perbandingan Agama di Indonesia’.

Dalam memahami ilmu perbandingan agama ada kesulitan yang disebut “*epoche*”, yaitu ‘meninggalkan untuk sementara credo yang diyakininya dan masuk ke dalam credo agama lain yang ingin dipahaminya’, Mukti Ali memberikan jalan keluar untuk mengatasi kesulitan ini, yaitu dengan “pengalaman bergaul” atau “mentransfer” pengalaman kita sendiri dalam meyakini dan menghayati agama yang kita peluk, ke dalam pemeluk agama lain dengan pengalamannya beragama.

Ilmu perbandingan agama seringkali disamaartikan dengan sejarah agama-agama, fenomenologi agama, ilmu agam-agama. Menurut Mukti Ali asal muasal ilmu perbandingan agama adalah ilmu agama-agama (*science of religions* atau *religionswissenschaft*). Dan dalam perkembangannya yang awalnya merupakan salah satu metode dari ilmu agama, akhirnya menjadi ilmu tersendiri.

Keistimewaan Mukti Ali, ia bisa menampilkan diri murni sebagai tokoh representatif umat Islam yang netral dari kepentingan kelompok. Dia bukan berasal dari organisasi NU, bukan pengurus Muhammadiyah, atau lainnya, dan bukan pula kader partai politik. Di samping itu, meski berpendidikan Barat, kharisma seorang menteri agama panutan umat tercermin pada sosok Mukti Ali. Bahkan beliau mensponsori berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) bulan Juli 1975, yang diantara fungsi utamanya memberikan

pertimbangan kepada umat Islam dan pemerintah mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan.

Kritik Mukti Ali terhadap pendidikan Islam di Indonesia adalah dalam hal dikotomi pendidikan Islam, yang terkesan terkotak-kotak. Pak Mukti menekankan perlunya keterpaduan pengetahuan keislaman. Pendidikan Islam di Indonesia dalam pandangan Mukti Ali bisa menimbulkan ketimpangan jika tidak dibenahi, karena pendidikan Islam waktu itu pengajarannya masih terpisah-pisah. Hal ini dapat dilihat misalnya orang-orang yang mempelajari tasawuf biasanya menganggap fikih sebagai ranah yang tidak begitu perlu. Demikian pula sebaliknya. Maka Mukti Ali menginginkan agar pendidikan Islam dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup segala aspek kajian dalam Islam baik tauhid, fikih, akhlaq, tasawuf, tafsir, hadist, tarikh dan sebagainya. Dengan cara itulah pendidikan Islam akan mengenai sasaran karena menjadi kemas yang efisien untuk memahami Islam secara kaffah. Dari sinilah Mukti Ali memulai gagasan pembaruannya. Memang semangat pembaruan Mukti Ali sudah tampak sejak ia belajar di Montreal, Kanada. Di sana ia sudah sering memperbandingkan pemikiran dua tokoh pembaharu yang menarik minatnya, yaitu Muhammad Abduh dan Kyai Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyah).

Dengan semangat pembaruan yang ia miliki serta keprihatinannya terhadap dunia pendidikan di tanah air, maka ia mengajukan beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh dunia pendidikan di Indonesia. Mukti Ali menyoroti kurangnya bahan bacaan, kurangnya kegiatan penelitian ilmiah, kurangnya diskusi akademis, dan masih rendahnya penguasaan bahasa asing. Empat hal inilah yang menurutnya menjadi kendala anak negeri untuk berkembang. Diakui atau

tidak, empat permasalahan itu pula yang sebenarnya masih tetap ada hingga saat ini.

Kegelisahan Mukti Ali tidak berhenti sampai disini, namun lebih luas lagi, bahkan diluar kajian keislaman. Disinilah tampak pemikiran modern Mukti Ali. Ia menginginkan dibudayakannya sikap ilmiah dalam berbagai bidang kajian, tentunya termasuk dalam kajian keislaman. Pendidikan Islam yang melulu didasarkan pada doktrin keagamaan tidak akan cukup untuk mengejar ketertinggalan dunia Islam terhadap perkembangan global. Maka Mukti Ali mengusung paradigma “scientific cum doctriner” sebagai pendekatan yang holistik dan diharapkan dapat memberi jawaban terhadap kebutuhan umat Islam Indonesia di era modern. Gagasan Mukti Ali ini juga tidak bisa dilepaskan dari iklim yang berkembang di Barat berkaitan dengan studi agama. Sejak paruh kedua abad ke-19, di Barat telah berkembang paradigma untuk melakukan studi agama dengan empat corak yaitu scientific, critical, historical, dan comparatif. Hal ini pula yang dilakukan Mukti Ali di tanah air. Mukti selalu mendorong kajian ilmiah terhadap agama-agama, apalagi melihat realitas keragaman agama dan budaya di Indonesia yang harus dikelola dengan baik.

Pemahaman yang mendalam terhadap pentingnya membina kerukunan antar umat beragama ini mendorong Mukti Ali untuk mencanangkan sebuah konsep pemikiran yang sangat dikenal dan menjadi icon bagi seorang Mukti Ali. Yaitu Konsep “agree in disagreement” setuju dalam ketidaksetujuan, atau sepakat dalam perbedaan. Hal ini disampaikan pertama kali oleh Mukti Ali dalam sebuah simposium di Goethe Institut Jakarta, beberapa bulan sebelum ia diangkat sebagai Menteri Agama. Pandangannya ini berangkat dari kesadaran akan pluralitas agama dan budaya di Indonesia, dilandasi

dengan pemahamannya yang mendalam terhadap teks-teks fundamental dalam Islam, dan tentunya juga semangat pembaruan yang telah dimilikinya sejak menimba ilmu di negeri orang. Berawal dari konsep *agree in disagreement* inilah Mukti Ali menjabarkan lebih lanjut dalam model kerukunan antar umat beragama.

Pertama, Mukti Ali menjelaskan pentingnya menjaga kerukunan antar umat seagama. Umat satu agama memiliki berbagai kelompok yang memiliki perbedaan, misalnya dalam Islam setidaknya ada empat mazhab besar, Islam di Indonesia juga terdiri dari Muhammadiyah, NU, Masyumi, DDII, dan sebagainya. Begitu pula umat agama non Islam yang memiliki perbedaan dalam satu tubuh. Jika perbedaan dalam satu agama ini tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin potensi tersebut berubah menjadi konflik. Seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir ini dalam tubuh umat Islam, bahkan intern ormas Islam-pun bisa terjadi bentrok antar kubu.

Kedua, ditekankan pula pentingnya menjaga kerukunan antar umat berbeda agama. Dalam sejarah, konflik agama di belahan bumi manapun pernah terjadi, tak terkecuali di negeri kita yang beberapa dasawarsa lalu sempat mengundang decak kagum dunia karena keberhasilannya mengelola kebhinekaan dalam semangat persatuan. Namun belakangan, konflik Ambon dan Poso adalah contoh nyata dari gagalnya pemerintah dan umat beragama mewujudkan poin kedua ini. Ketiga, pentingnya membina hubungan umat beragama dengan pemerintah, agar kehidupan beragama dapat dilaksanakan dengan perasaan damai dan terjamin. Berkaitan dengan hal ini Mukti Ali juga menyatakan bahwa Negara Indonesia bukanlah negara teokrasi dan bukan pula sekuler.

Setelah tidak lagi menjabat sebagai

menteri agama, model kerukunan yang dimulai oleh Mukti Ali tersebut diteruskan oleh penggantinya yaitu Alamsyah Ratu Prawiranegara, dan dikemas menjadi Trilogi Kerukunan Antar Umat Beragama. Selanjutnya konsep ini diajarkan dengan baik di sekolah-sekolah dari tingkat SD bahkan hingga Perguruan Tinggi. Sehingga pendidikan akan pentingnya menghargai pluralitas dan menjaga kerukunan dapat ditanamkan pada anak bangsa.

Selain beberapa hal diatas, selama menjabat sebagai menteri agama, Mukti Ali juga meluluskan beberapa kebijakan penting. Diantaranya adalah upaya rasionalisasi Departemen Agama sebagai lembaga yang bertugas membangun manusia Indonesia seutuhnya. Mukti Ali pula yang mempopulerkan konsep manusia Indonesia seutuhnya yaitu kriteria pembangunan jasmani dan rohani manusia yang tentunya mensyaratkan adanya unsur iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia juga memasukkan pembangunan di bidang agama dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Mukti Ali juga menegaskan bahwa IAIN memiliki tugas yang sama dengan perguruan tinggi lainnya, yaitu melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pengajaran dan pendidikan, penelitian serta pengabdian masyarakat. Mukti Ali juga mensponsori berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) bulan Juli 1975, yang fungsi utamanya adalah memberikan pertimbangan kepada umat Islam dan pemerintah mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan.

Pemikiran Mukti Ali dalam Konteks Pluralisme di Indonesia

Secara sosiologis, pluralisme agama adalah suatu kenyataan bahwa kita adalah berbeda-beda, beragam dan plural dalam hal beragama. Ini adalah kenyataan sosial,

sesuatu yang niscaya dan tidak dapat dipungkiri lagi. Dalam kenyataan sosial, kita telah memeluk agama yang berbeda-beda. Pengakuan terhadap adanya pluralisme agama secara sosiologis ini merupakan pluralisme yang paling sederhana, karena pengakuan ini tidak berarti mengizinkan pengakuan terhadap kebenaran teologi atau bahkan etika dari agama lain.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Rasjidi bahwa agama adalah masalah yang tidak dapat ditawar-tawar, apalagi berganti.¹⁴ Ia mengibaratkan agama bukan sebagai (seperti) rumah atau pakaian yang kalau perlu dapat diganti. Jika seseorang memeluk keyakinan, maka keyakinan itu tidak dapat pisah darinya.¹⁵ Berdasarkan keyakinan inilah, menurut Rasjidi, umat beragama sulit berbicara objektif dalam soal keagamaan, karena manusia dalam keadaan *involved* (terlibat). Sebagai seorang muslim misalnya, ia menyadari sepenuhnya bahwa ia *involved* (terlibat) dengan Islam.¹⁶ Namun, Rasjidi mengakui bahwa dalam kenyataan sejarah masyarakat adalah *multi-complex* yang mengandung *religious pluralism*, bermacam-macam agama. Hal ini adalah realitas, karena itu mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri, dengan mengakui adanya *religious pluralism* dalam masyarakat Indonesia.¹⁷

Dapat dicermati bahwa Rasjidi tidak memandang adanya pertemuan dalam masalah-masalah teologis. Pandangan pluralismenya tidak berarti adanya pertemuan dalam hal keimanan, namun hanya merupakan pengakuan atas keberadaan agama-agama lain. Pandangan pluralismenya tidak sampai masuk pada perbincangan tentang kebenaran-kebenaran yang ada di dalam agama lain. Ia sama sekali tidak menyinggung tentang hal itu. Namun demikian, ia juga tidak memandang kesalahan-kesalahan ajaran teologis dari agama lain. Kritiknya terhadap agama lain

adalah kritik sosial, dalam arti bahwa ia mengkritik praktek-praktek misi atau zending dari agama Kristen. Ia mengkritik aktivitas misi atau zending tersebut. Ia tidak mengkritik berbagai ajaran teologis yang ada di dalam agama Kristen.

Karena itulah pola yang dipakai Rasjidi adalah pola responsif atas persoalan yang berkembang, misalnya tentang kristenisasi, sehingga terkesan defensif. Apa yang dikemukakannya adalah sebuah pembelaan, sebuah dialog bertahan, bukan menyerang. Pembelaan Rasjidi atas berbagai persoalan yang menimpa umat Islam disampaikan secara terus-terang dan terbuka, bahkan kadang kalah tidak dapat menghindari munculnya tuduhan, tuding dalam dalam hal-hal yang empirik (aktual). Ia tidak pernah menutupi sesuatu pun, meskipun hal itu terasa pahit dan keras, misalnya tentang apa yang dilakukan oleh umat Kristen.

Terdapat kesan bahwa pandangan tentang *absolutisme* agama didasarkan oleh kandungan ajaran bahwa pemeluk agama tidak dapat objektif terhadap kebenaran lain. Bagi umat Islam barangkali didasarkan pada ajaran bahwa “agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam”.

Pengakuan pluralisme secara sosiologis ini juga dikemukakan oleh Mukti Ali. Mukti Ali secara sosial tidak mempersoalkan adanya pluralisme, dalam pengakuan-pengakuan sosial, tetapi ia sangat tegas dalam hal-hal teologis. Ia menegaskan bahwa keyakinan terhadap hal-hal teologis tidak bisa dipakai hukum kompromistis. Oleh karena itu, dalam satu persoalan (objek) yang sama, masing-masing pemeluk agama memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, misalnya pandangan tentang al-Qur’an, Bibel, Nabi Muhammad, Yesus dan Mariam.

Menurutnya, orang Islam melakukan penghargaan yang tinggi terhadap Mariam

dan Jesus. Hal itu merupakan bagian keimanan orang Islam. Orang Islam sungguh tidak dapat mempercayai (mengimani) ketuhanan Jesus Kristus tetapi mempercayai kenabiannya sebagaimana Nabi Muhammad. Kemudian, orang Islam juga tidak hanya memandang al-Qur'an tetapi juga Torah dan Injil sebagai Kitab Suci (Kitabullah). Yang menjadi persoalan, apakah Kitab Bibel yang ada sekarang ini otentik atau tidak, dan apakah seluruhnya merupakan wahyu Tuhan. Hal ini bukan berarti bahwa orang Islam selalu menolak Wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Musa, Isa atau rasul-rasul lain, meskipun orang Islam tidak bisa mengakui bahwa Bibel sebagaimana sebelum mereka hari ini terdiri dari Kalam Tuhan seluruhnya. Namun demikian, orang Islam percaya bahwa Bibel memuat/mengandung Kalam Tuhan.¹⁸

Tampak Mukti Ali ingin menegaskan bahwa masing-masing agama memiliki keyakinan teologis yang tidak bisa dikompromikan. Islam memiliki keimanan sendiri, bahkan termasuk mengenai hal-hal yang diyakini oleh umat agama lain, misalnya konsep tentang Nabi Isa. Begitu juga, Kristen memiliki keimanan sendiri, bahkan termasuk mengenai hal-hal yang diyakini oleh Islam, misalnya konsep tentang Nabi Muhammad.

Jadi, pengakuan tentang pluralismenya berada pada tataran sosial, yakni bahwa secara sosiologis kita memiliki keimanan dan keyakinan masing-masing. Persoalan kebenaran adalah persoalan dalam wilayah masing-masing agama.

Mukti Ali menjelaskan bahwa ada beberapa pemikiran diajukan orang untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan beragama. *Pertama*, sinkretisme, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama. *Kedua*, *reconception*, yaitu

menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasi dengan agama-agama lain. *Ketiga*, *synthesis*, yaitu menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya diambilkan dari pelbagai agama, supaya dengan demikian tiap-tiap pemeluk agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah terambil dalam agama sintesis (campuran) itu. *Keempat*, *penggantian*, yaitu mengakui bahwa agamanya sendiri itulah yang benar, sedang agama-agama lain adalah salah; dan berusaha supaya orang-orang yang lain agama masuk dalam agamanya. *Kelima*, *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan), yaitu percaya bahwa agama yang dipeluk itulah agama yang paling baik, dan mempersilahkan orang lain untuk mempercayai bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik. Diyakini bahwa antara satu agama dan agama lainnya, selain terdapat perbedaan, juga terdapat persamaan.¹⁹

Mukti Ali sendiri setuju dengan jalan "*agree in disagreement*". Ia mengakui jalan inilah yang penting ditempuh untuk menimbulkan kerukunan hidup beragama. Orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang ia peluk itulah agama yang paling baik dan paling benar, dan orang lain juga dipersilahkan, bahkan dihargai, untuk percaya dan yakin bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar.²⁰

Wacana pluralisme agama Djohan Effendi berbeda dengan pluralisme Rasjidi dan Mukti Ali di atas. Pengakuan pluralisme Djohan Effendi bukan hanya pengakuan secara sosiologis bahwa umat beragama berbeda, tetapi juga pengakuan tentang titik temu secara teologis di antara umat beragama. Djohan tidak setuju dengan absolutisme agama. Ia membedakan antara agama itu sendiri dengan keberagamaan manusia. Pengertian antara agama dan

keberagamaan harus dipahami secara proporsional. Menurutnya, agama – terutama yang bersumber pada wahyu, diyakini sebagai bersifat *ilahiyah*. Agama memiliki nilai mutlak. Namun, ketika agama itu dipahami oleh manusia, maka kebenaran agama itu tidak bisa sepenuhnya ditangkap dan dijangkau oleh manusia, karena manusia sendiri bersifat nisbi. Oleh karena itu, kebenaran apapun yang dikemukakan oleh manusia –termasuk kebenaran agama yang dikatakan oleh manusia—bersifat nisbi, tidak absolut. Yang absolut adalah kebenaran agama itu sendiri, sementara kebenaran agama yang dikatakan oleh manusia itu nisbi. Kebenaran absolut itu hanya bisa diketahui oleh ilmu Tuhan.²¹

Dengan bahasa lain, Greg Barton menyebut bahwa Djohan Effendi menolak absolutisme agama dan mengakui pluralisme agama.²²

Djohan mengemukakan:

“Sebagai makhluk yang bersifat nisbi, pengertian dan pengetahuan manusia tidak mungkin mampu menjangkau dan menangkap agama sebagai doktrin kebenaran secara tepat dan menyeluruh. Hal itu hanya ada dalam ilmu Tuhan. Dengan demikian apabila seorang penganut mengatakan perkataan agama, yang ada dalam pikirannya bukan hanya agama sendiri, akan tetapi juga aliran yang dianutnya, bahkan pengertian dan pemahamannya sendiri. Oleh karena itu, pengertian dan pemahamannya tentang agama jelas bukan agama itu sendiri dan karena itu tidak ada alasan untuk secara mutlak dan a priori menyalahkan pengertian dan pemahaman orang lain.”²³

Pemikiran pluralisme Djohan Efendi berangkat dari suatu pemahaman bahwa dakwah (baik Islam maupun Kristen) adalah

sesuatu yang penting, tapi ia kurang setuju jika keberagamaan seperti itu bertolak dari pandangan keagamaan yang bersifat mutlak dan statis (menganggap bahwa kebenaran atau keselamatan menjadi klaim satu kelompok). Dari sinilah, menurut Djohan, dialog merupakan sesuatu yang esensial untuk merangsang keberagamaan kita agar tidak mandeg dan statis.²⁴ Sekali lagi, Djohan tidak menyetujui absolutisme agama, sehingga paksaan atau kekerasan apapun tidak boleh mendapat tempat di dalam usaha-usaha dakwah. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah sikap moderat dan liberal terhadap iman lain. Dari situlah, teologi kerukunan akan bisa terwujud. Djohan mengemukakan:

“Dengan pendekatan dan pemahaman yang menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dan ketidakmutlakan manusia, boleh jadi bisa dikembangkan semacam Teologi Kerukunan, yaitu suatu pandangan keagamaan yang tidak bersifat memonopoli kebenaran dan keselamatan, suatu pandangan keagamaan yang didasarkan atas kesadaran bahwa agama sebagai ajaran kebenaran tidak pernah tertangkap dan terungkap oleh manusia secara penuh dan utuh, dan bahwa keagamaan seseorang pada umumnya, lebih merupakan produk, atau setidak-tidaknya pengaruh lingkungan.”²⁵

Djohan membuat garis pembatas yang tegas antara agama dan keberagamaan. Kedua hal ini tidak dapat dicampuraduk. Ia tidak setuju terhadap pandangan keagamaan seseorang –sebagai suatu keberagamaan— yang dianggap bersifat absolut. Absolutisme keberagamaan adalah tidak benar. Berbagai persoalan yang menimpa umat beragama sering kali disebabkan adanya pandangan bahwa keberagamaan seseorang sebagai satu-satunya yang paling benar, sementara keberagamaan orang lain salah. Inilah yang

kemudian menumbuhkan adanya misi, zending, dakwah dan semacamnya.

Menurutnya, Islam secara tegas memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia dalam masalah agama dan keberagamaan. Ia merujuk ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa "tak ada paksaan dalam agama."²⁶

Ia juga merujuk ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan mempersilahkan siapa saja yang mau beriman atau kufur terhadap-Nya.²⁷ Menurutnya, Islam sama sekali tidak menafikan agama-agama yang ada. Islam mengakui eksistensi agama-agama tersebut dan tidak menolak nilai-nilai ajarannya. Kebebasan beragama dan respek terhadap agama dan kepercayaan orang lain adalah ajaran agama, disamping itu memang merupakan sesuatu yang penting bagi masyarakat majemuk. Dengan demikian, membela kebebasan beragama bagi siapa saja dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain dianggap sebagai bagian dari kemusliman.²⁸ Ia merujuk ayat al-Qur'an yang menyatakan keharusan membela kebebasan beragama yang disimbolkan dengan sikap mempertahankan rumah-rumah ibadah seperti biara, gereja, sinagog, dan masjid.²⁹

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Nurcholis Madjid. Ia mengemukakan ketidaksetujuannya dengan absolutisme, karena absolutisme adalah pangkal dari segala permusuhan. Ia mengatakan:

"Petunjuk konkret lain untuk memelihara ukhuwah adalah tidak dibenarkannya sama sekali suatu kelompok dari kalangan orang-orang beriman untuk memandang rendah atau kurang menghargai kelompok lainnya, sebab siapa tahu mereka yang dipandang rendah itu lebih baik daripada mereka yang memandang rendah. Ini mengajajarkan kita –dalam pergaulan dengan sesama manusia, khususnya sesama

kalangan yang percaya kepada Tuhan—tidak melakukan absolutisme, suatu pangkal dari segala permusuhan."³⁰

Nurcholish menegaskan betapa pentingnya kehidupan beragama. Ia tidak menjelaskan secara tegas apakah yang dimaksud agama di sini adalah agama Islam saja. Artinya, agama yang dimaksud adalah agama secara umum. Namun, dengan bahasa yang dialektis, ia melakukan otokritik terhadap pemeluk agama. Ia mengakui bahwa dalam agama-agama, lebih tepatnya, dalam lingkungan para penganut agama-agama, selalu ada potensi kenegatifan dan perusakan yang amat berbahaya.³¹

Nurcholish melihat bahwa peta tahun 1992 sedang ditandai oleh konflik-konflik dengan warna keagamaan. Diakui, agama memang bukan satu-satunya faktor,³²

Faktor-faktor selain agama, misalnya, adalah faktor kebangsaan, kesukuan, kebahasaan, kesenjangan ekonomi, kesejarahan, kekuasaan teritorial, dan sebagainya.

Tapi jelas sekali bahwa pertimbangan keagamaan dalam konflik-konflik itu dan dalam eskalasinya sangat banyak memainkan peran. Setiap warna keagamaan dalam suatu konflik seringkali melibatkan agama formal atau agama terorganisir (*organized religion*). Ia menyebut tempat-tempat konflik; Irlandia, sekitar Perancis dan Jerman, Bosnia-Herzegovina, Cyprus, Palestina, Timur Dekat, Afrika Hitam, Sudan, Perang Teluk, Pakistan, Srilangka, Burma, Thailand, dan Filipina.³³

Menanggapi semboyan yang diperkenalkan oleh futurolog, John Naisbitt dan Patricia Aburdene, *Spirituality, Yes; Organized Religion, No*, Nurcholish menyatakan bahwa semboyan itu mengandung makna prinsipil daripada semboyan yang pernah ia kemukakan 20 tahun sebelumnya –"Islam, Yes; Partai

Islam, No”. Nurcholish mengaku mengalami kesulitan besar, bahkan kemustahilan, untuk dapat menerima kebenarannya. Ia juga menegaskan bahwa semboyan *Spirituality, Yes; Organized Religion, No*, agaknya tidak memiliki pijakan yang kuat.³⁴ Artinya, agama-agama resmi memang masih menjadi fenomena yang banyak memainkan peran dalam kehidupan manusia.

Merujuk pada Kitab Suci al-Qur'an, Nurcholish menegaskan bahwa setiap umat atau golongan manusia telah pernah dibangkitkan atau diutus seorang utusan Tuhan, dengan tugas menyeru umatnya untuk menyembah kepada Tuhan saja (dalam pengertian paham Ketuhanan Yang Maha Esa yang murni). Ia mengutip Surat al-Nahl (16): 36. Berdasarkan firman-firman Allah itu dikatakan bahwa:

“... semua agama Nabi dan Rasul yang telah dibangkitkan dalam setiap umat adalah sama, dan inti dari ajaran semua Nabi dan Rasul itu ialah Ketuhanan Yang Maha Esa dan perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan tiranik. Dengan perkataan lain, Ketuhanan Yang Maha Esa dan perlawanan terhadap tirani adalah titik pertemuan, *common platform* atau, dalam bahasa al-Qur'an, *kalimatun-sawa'* (kalimat atau ajaran yang sama) antara semua kitab suci.”³⁵

Menurut Nurcholish, kesamaan-kesamaan yang ada dalam agama-agama bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Ia berargumentasi, semua yang benar berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah, Yang Maha Benar (*al-Haqq*). Semua Nabi dan Rasul membawa ajaran kebenaran yang sama. Sementara itu, adanya perbedaan itu hanyalah dalam bentuk-bentuk responsi khusus tugas seorang Rasul kepada tuntutan zaman dan tempatnya. Ditegaskan bahwa perbedaan itu tidaklah prinsipil, sedangkan ajaran pokok atau syariat para Nabi dan

Rasul adalah sama. Dalam rangka menjelaskan hal ini, ia mengutip al-Qur'an, yakni dalam Surat Al-Syûrâ (42):13, al-Nisâ' (4):163-165, al-Baqarah (2):136, al-Ankabût (29):46, Al-Syûrâ (42):15, dan al-Mâidah (5):8. Ayat-ayat yang dikutip itu berkenaan dengan kesamaan antara syariat Muhammad dengan syariat Nuh, Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, Ayyub, Yunus, Harun, Musa, Sulaiman, Dawud, Isa dan kepada rasul-rasul yang tidak dikisahkan kepada Muhammad.³⁶ Ayat-ayat itu menunjukkan adanya kesinambungan, kesatuan dan persamaan agama-agama para Nabi dan Rasul Allah. Nurcholish mengkritik masyarakat sekarang ini, baik Muslim maupun yang bukan, karena banyak yang tidak menyadari adanya pandangan itu.

Menjelaskan tentang titik temu agama-agama, ada empat prinsip yang dikemukakan oleh Nurcholish. *Pertama*, Islam mengajarkan bahwa agama Tuhan adalah universal, karena Tuhan telah mengutus Rasul-Nya kepada setiap umat manusia. *Kedua*, Islam mengajarkan pandangan tentang kesatuan nubuwah (kenabian) dan umat yang percaya kepada Tuhan. *Ketiga*, agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah kelanjutan langsung agama-agama sebelumnya, khususnya yang secara “genealogis” paling dekat ialah agama-agama Semitik-Abrahamik. *Keempat*, umat Islam diperintahkan untuk menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang beragama lain, khususnya para penganut kitab suci (*Ahl al-Kitab*).³⁷ Semua prinsip itu mengarah pada ajaran “tidak boleh ada paksaan dalam agama”.

Menurut Nurcholish, pandangan-pandangan inklusivitas amat relevan untuk dikembangkan pada zaman sekarang, yaitu zaman globalisasi berkat teknologi informasi dan transportasi, yang membuat umat manusia hidup dalam sebuah “desa buwana”

(*global village*). Ia menegaskan:

“Dalam desa buwana itu, seperti telah disinggung, manusia akan semakin intim dan mendalam mengenal satu sama lain, tetapi sekaligus juga lebih mudah terbawa kepada penghadapan dan konfrontasi langsung. Karena itu sangat diperlukan sikap-sikap saling mengerti dan paham, dengan kemungkinan mencari dan menemukan titik kesamaan atau *kalimatun sawa*’ seperti diperintahkan Allah dalam al-Qur’an. Dengan tegas al-Qur’an melarang pemaksaan suatu agama kepada orang atau komunitas lain, betapapun benarnya agama itu, karena akhirnya hanya Allah yang bakal mampu memberi petunjuk kepada seseorang, secara pribadi. Namun, demi kebahagiaannya sendiri, manusia harus terbuka kepada setiap ajaran atau pandangan, kemudian bersedia mengikuti mana yang terbaik. Itulah pertanda adanya hidayah Allah kepada mereka. Dan patut kita camkan benar-benar pendapat Sayyid Muhammad Rasyid Ridla sebagaimana dikutip oleh ‘Abdul Hamid Hakim bahwa pengertian sebagai *Abl al-kitab* tidak terbatas hanya kepada kaum Yahudi dan Kristen seperti tersebut dengan jelas dalam al-Qur’an serta kaum Majusi (pengikut Zoroaster) seperti tersebut dalam sebuah hadits, tetapi juga mencakup agama-agama lain yang mempunyai suatu bentuk kitab suci.”³⁸

Nurcholish menyinggung tentang bagaimana sikap keberagamaan yang benar. Ia menegaskan bahwa sebaik-baik agama di sisi Allah ialah *al-hanîfiyyah al-sambah*, agama yang memiliki semangat kebenaran yang lapang dan terbuka. Ia mengemukakan:

“Sikap mencari Kebenaran secara tulus dan murni (*hanîfiyyah*, kehanifan) adalah sikap keagamaan yang benar, yang menjanjikan kebahagiaan sejati, dan yang tidak bersifat *palliative* atau menghibur secara

semu dan palsu seperti halnya kultus dan fundamentalisme. Maka Nabi pun menegaskan bahwa sebaik-baik agama di sisi Allah ialah *al-hanîfiyyah al-sambah* (baca: “*al-hanîfiyyatus-sambah*”) yaitu semangat mencari kebenaran yang lapang, toleran, tidak sempit, tanpa kefanatikan, dan tidak membelenggu jiwa.”³⁹

Oleh karena itu, umat Islam tidak dilarang untuk berbuat baik dan adil kepada siapapun dari kalangan bukan Muslim yang tidak menunjukkan permusuhan, baik atas nama agama atau lainnya, seperti penjajahan, pengusiran dari tempat tinggal dan bentuk penindasan yang lain.⁴⁰

Sementara itu, Abdurrahman Wahid menegaskan masalah pluralisme bukan dalam pengertian pluralisme yang dikemukakan oleh Djohan Effendi dan Nurcholish Madjid di muka. Ia menekankan pandangan keterbukaan untuk menemukan kebenaran di mana pun juga.⁴¹ Pluralisme yang ditekankan Gus Dur adalah pluralisme dalam bertindak dan berpikir. Inilah yang melahirkan toleransi. Sikap toleran tidak bergantung pada tingginya tingkat pendidikan formal atau pun kepintaran pemikiran secara alamiah, tetapi merupakan persoalan hati, persoalan perilaku. Tidak pula harus kaya dulu. Bahkan, seringkali semangat ini terdapat justru pada mereka yang tidak pintar juga tidak kaya, yang biasanya disebut “orang-orang terbaik”.⁴²

Gus Dur memberi contoh sebagaimana yang dilakukan oleh Kyai Iskandar, dengan cara bergaul secara berbau dalam masyarakat.

Gus Dur mengembangkan pandangan anti eksklusivisme agama. Menurutnya, berbagai peristiwa kerusuhan yang berkedok agama di beberapa tempat adalah akibat adanya eksklusivisme agama.⁴³ Apa yang disampaikan oleh Gus Dur sebenarnya lebih merupakan otokritik bagi umat Islam

sendiri, karena adanya politisasi agama dan pendangkalan agama.

Berkenaan dengan makna salah satu ayat al-Qur'an Surat Al-Fath (48) ayat 9 yang berbunyi "*Asyiddâ-u-âlâ al-Kuffârm rubamâ-u bayna hum*", ia memahami bahwa ada perbedaan antara orang non-Muslim sekarang dengan kaum kafir yang memerangi agama Islam (dalam konteks ayat itu adalah kaum kafir Mekkah). Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengembangkan sikap permusuhan kepada mereka selama tidak memerangi agama Islam. Selain itu, menurutnya, esensi "saling menyantuni" justru terletak pada sikap-sikap di mana kita bisa saling mengoreksi sesama orang Islam. Nabi pernah mencontohkan, bahwa jika Fatimah (putri beliau) melakukan pencurian maka ia tetap harus dihukum. Jadi, sikap santun tidak boleh dengan standar ganda atau tidak boleh mengabaikan keadilan kepada siapa pun, termasuk orang berlainan agama.⁴⁴

Kemudian, berkenaan dengan bunyi ayat al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 120 (*Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sampai kamu ikuti agama mereka*), Gus Dur memandang bahwa ayat ini sering digunakan untuk membenarkan sikap dan tindakan anti-toleransi, karena kata "tidak rela" di sini dianggap melawan atau memusuhi, lalu dikaitkan dengan pembuatan gereja-gereja, penginjilan atau pekabaran Injil, dan sebagainya. Menurutnya, kata "tidak rela" harus didudukan secara proporsional. Tidak rela itu artinya tidak bisa menerima konsep-konsep dasar. Tentu saja, ini tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Tidak menerima konsep dasar bukan berarti mesti mengembangkan sikap permusuhan atau perlawanan. Kristen dan Yahudi tidak bisa menerima konsep dasar Islam adalah sudah pasti. Begitu juga sebaliknya, Islam juga tidak

bisa menerima konsep dasar agama Kristen dan Yahudi. Oleh karena itu, menurutnya, kita tidak akan goyang dari konsep Tauhid, tapi kita menghargai pendapat orang lain.⁴⁵ Pendapat orang lain ini tentu saja berarti keyakinan orang lain.

Sementara itu, Alwi Shihab menunjukkan dua komitmen penting yang harus dipegang oleh dialog, yaitu sikap toleransi dan sikap pluralisme. Toleransi adalah upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan. Adapun yang dimaksud dengan pluralisme adalah (1) tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun adanya *keterlibatan aktif* terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan, dalam kebhinekaan. (2) pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjuk pada suatu realita di mana aneka ragam agama, ras, bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Namun, interaksi positif antar penduduk ini, khususnya di bidang agama, sangat minimal, walaupun ada. (3) konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Karena, konsekuensi dari paham relativisme agama bahwa doktrin agama apapun harus dinyatakan benar. Atau, "semua agama adalah sama". Oleh karena itu, seorang relativis tidak akan mengenal, apalagi menerima, suatu kebenaran universal yang berlaku untuk semua dan sepanjang masa. Namun demikian, paham pluralisme terdapat unsur relativisme, yakni unsur tidak mengklaim kebenaran tunggal (monopoli) atas suatu kebenaran, apalagi memaksakan kebenaran tersebut kepada pihak lain. Paling

tidak, seorang pluralis akan menghindari sikap absolutisme yang menonjolkan keunggulannya terhadap pihak lain. (4) pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yakni menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut.⁴⁶

Satu hal yang ditegaskan oleh Alwi adalah apabila konsep pluralisme agama hendak diterapkan di Indonesia, maka ia harus bersyaratkan komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing. Seorang pluralis, dalam berinteraksi dengan aneka ragam agama, tidak saja dituntut untuk membuka diri, belajar dan menghormati mitra dialognya, tetapi yang terpenting ia harus *committed* terhadap agama yang dianutnya. Hal ini untuk menghindari relativisme agama. Ia menekankan perlunya membudayakan sikap keterbukaan, menerima perbedaan, dan menghormati kemajemukan agama, dibarengi loyalitas komitmen terhadap agama masing-masing.⁴⁷

Alwi menegaskan, Islam sejak semula menganjurkan dialog dengan umat lain. Dikatakan, terhadap pengikut Isa a.s. dan Musa a.s., al-Qur'an menggunakan kata *abl al-kitab* (yang memiliki kitab suci). Penggunaan kata *abl*, yang berarti keluarga, menunjukkan keakraban dan kedekatan hubungan.⁴⁸

Dari berbagai pandangan tentang pluralisme di atas Penulis dapat mengklasifikasi ada tiga model pluralisme. *Pertama*, pandangan pluralisme yang masih menyisakan adanya absolutisme agama. Pandangan ini dikemukakan Rasjidi dan Natsir. *Kedua*, pandangan pluralisme liberal. Ini dikemukakan oleh Djohan Effendi, Nurcholish Madjid, dan Abdurrahman Wahid. *Ketiga*, pandangan pluralisme yang menempati posisi antara absolutisme agama

dan pluralisme liberal. Pandangan ini masih memegang adanya hal-hal yang bersifat absolut yang tidak dapat dipertemukan atau disamakan, tetapi juga mengakui bahwa pluralisme itu tidak hanya sekedar ada namun juga harus diwujudkan dalam keterlibatan aktif dalam memahami perbedaan dan persamaan. Ada sikap terbuka, menerima perbedaan, dan menghormati kemajemukan agama, tetapi ada loyalitas komitmen terhadap agama masing-masing. Konsep yang dikemukakan Mukti Ali "*agree in disagreement*" kiranya dapat mewakili pandangan yang terakhir ini. Begitu juga pandangan Alwi Shihab.

Kesimpulan

Terlahir dari keluarga saudagar membuat Boedjono bebas bergelilya mencari ilmu. Selepas dari HIS di Cepu, oleh sang ayah, H. Abu Ali, ia mondok di Pesantren Termas, Pacitan, 170 kilometer di selatan Cepu. Di sinilah Boedjono, yang lahir di Desa Balun Sudagaran, Cepu, 23 Agustus 1923, mulai bersentuhan dengan buku-buku yang diimpor dari Mesir, seperti buku tentang mantiq (logika), tasawuf dan filsafat.

Di kemudian hari, Boedjono sempat menimba ilmu *Kyai Hamid Pasuruan* dan *Kyai Hamid Dimiyati*. Oleh Kyai Hamid Pasuruan, Boedjono diminta mengganti namanya menjadi *Abdul Mukti*, yang tak lain nama kecil sang kyai. Boedjono tentu amat tersanjung, ia pun memadukannya dengan nama sang ayah, menjadi *Abdul Mukti Ali*.

Dari Cepu dan Pacitan, Mukti Ali melakukan lompatan-lompatan yang jauh ; belajar ilmu perbandingan agama (sampai tingkat doctoral) di Universitas Karachi, Pakistan, kemudian melanjutkan pendidikan di Faculty of Divinity & Islamic Studies di McGill University, Kanada. Ia banyak belajar, menyerap dan menularkan ilmunya. Mukti kerap menganjurkan oksidentalisme

-gerakan untuk mempelajari Islam dari sudut pandang Barat-.

Sebelum diangkat menjadi Menteri Agama pada November 1971, ia sempat melontarkan konsep “agree in disagreement” –atau sepakat dalam perbedaan- , dalam symposium di Goethe Institut Jakarta. Pandangannya ini berangkat dari kesadaran akan pluralitas agama dan budaya di Indonesia, dilandasi dengan pemahamannya yang mendalam terhadap teks-teks fundamental dalam Islam.

Pentingnya menjaga kerukunan antar umat seagama, kata Mukti, disadari oleh kenyataan satu agama memiliki berbagai kelompok yang memiliki perbedaan. Di Islam setidaknya ada empat madhab besar. Islam di Indonesia juga terdiri atas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Masyumi, dan Dewan Dakwah. Begitu pula umat agama non-Islam yang memiliki perbedaan dalam satu tubuh. Jika perbedaan ini tak dikelola dengan baik, sangat berpotensi menjadi konflik.

Mukti Ali pula yang menawarkan pemahaman agama secara kontekstual atau bersifat sosio-historis. Suatu metode pemahaman terhadap kepercayaan, ajaran, atau keyakinan yang muncul dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan dan lingkungan tempat kepercayaan, ajaran, atau keyakinan itu muncul.

Sebagai menteri, Mukti Ali tak dikategorikan sebagai ulama sebagaimana pendahulunya, KH. M. Dahlan, tapi sebagai “teknokrat” sejajar dengan Widjojo Nitisastro dan kawan-kawan. Sebagai menteri, ia memperkenalkan program “pengembangan pesantren” dengan pendekatan *community development*. Juga mengusulkan pendidikan keterampilan dan kewiraswastaan di lingkungan pesantren.

Melalui Departemen Agama, Mukti Ali juga mendukung program Keluarga Berencana.

Wartawan senior Syu’bah Asa (alm) menilai sepak terjang Mukti Ali sebagai menteri berhasil mengubah citra Departemen Agama menjadi lembaga yang lebih “bersahabat”. Maklum, sebelumnya Departemen yang dipimpin KH. M. Dahlan ini laksana *orang tua yang gemar menghukum anak-anaknya*.

Satu hal lagi yang menarik dari guru Besar Perbandingan Agama sekaligus mantan Rektor IAIN Sunan Kalijaga ini adalah sikapnya yang sangat toleran terhadap umat agama lain. Sikap ini menempatkan Mukti Ali dalam jajaran tokoh-tokoh pengusung liberalisme dalam Islam, atau setidaknya bisa disebut sebagai tokoh moderat dan inklusif. Sikap diamnya terhadap sepak terjang Harun Nasution dianggap oleh sebagian orang sebagai keberpihakan Mukti Ali terhadap pemikiran liberal dalam Islam. Harun Nasution dikenal sebagai tokoh yang cukup geram dengan aroma mistis dalam masyarakat Islam di Indonesia, Harun Nasution juga dikenal sebagai tokoh yang mencoba meruntuhkan angkuhnya dinding normativisme dalam nalar Islam. Oleh karenanya, professor dan Guru Besar UIN Jakarta ini sempat dituding sebagai penganut Paham Mu’tazilah. Namun Mukti Ali dengan cerdas berada di tengah-tengah dengan memilih bersikap moderat. Mukti Ali menyadari bahwa perkembangan pemikiran Islam modern memang diperlukan bagi kemajuan umat Islam di Indonesia, namun dia juga sadar bahwa menjaga hubungan baik dengan umat yang sebagian besar masih berparadigma normatif tetaplah penting.

Hal inilah yang membedakan Mukti Ali dengan para pengusung modernisasi Islam yang lain seperti Harun Nasution dan Ahmad Wahib. Jika kedua tokoh tersebut

terkesan frontal dan berapi-api dalam melontarkan gagasannya, Mukti Ali justru memilih cara-cara yang kalem dan persuasif. Mukti Ali berupaya agar gagasannya tidak menimbulkan kontra. Apalagi Mukti Ali juga mengakui bahwa kebijakannya tersebut juga dilandasi dengan prinsip keadilan yang ia temukan dalam Islam yaitu: kebebasan hati nurani, kemanusiaan yang egaliter, dan solidaritas sosial yang kokoh.

Kelebihan Mukti Ali antara lain juga tercermin dalam kemampuannya menampilkan diri sebagai sosok yang netral, bukan NU dan Bukan Muhammadiyah, bukan dari ormas atau parpol tertentu. Meskipun dia hasil didikan Barat namun keberpihakannya pada nasib bangsa Timur tak pernah diragukan.

Singkatnya, banyak hal positif dapat diambil dari diri Mukti Ali, sikap tawadu' disiplin, toleran, kegigihannya dapat diteladani. Langkah-langkah yang telah dimulainya adalah batu pijakan yang harus diteruskan karena memang sedang sangat dibutuhkan bangsa ini, buah pikirannya juga merupakan kontribusi penting yang selalu bisa dirujuk oleh generasi saat ini. Ibarat di padang gersang, Mukti Ali adalah oase tempat gembala, penduduk, dan kafilah melepas dahaga.

Catatan Akhir

- ¹ H.M. Bibit Suprpto (2009). *Ensiklopedi Ulama Nusantara*. Gelegar Media Indonesia. ISBN 979-98066-1114-5. Halaman 53-57. Lihat juga www.academia.edu: Mengubah dan Membentuk IAIN: Profil Mukti Ali.
- ² Ali Munhanif (1998). *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*. Badan Litbang Agama Departemen Agama RI. ISBN 979-95248-3-0. Halaman 271-319
- ³ Muhammad Damami, dkk (ed.) (1998). *Lima Tokoh Pengembangan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Halaman 165-205.

- ⁴ Abdurrahman, dkk (ed.) (1993). *Tujuh Puluh Tahun H. A. Mukti Ali: Agama dan Masyarakat*. IAIN Sunan Kalijaga Press. ISBN 979-8547-00-4. Halaman 3-14, 20-28, 41-43.
- ⁵ Ali Muhannif, *Op.Cit.*,
- ⁶ Abdurrahman, dkk (ed.), *Op.Cit*
- ⁷ *Ibid.*,
- ⁸ Muhammad Damami, *Op.Cit.*,
- ⁹ HM Bibit Suprpto, *Op.Cit*
- ¹⁰ www.academia.edu: Mengubah dan Membentuk IAIN: Profil Mukti Ali.
- ¹¹ Ali Muhannif, *Op.Cit.*
- ¹² Abdurrahman, dkk (ed.), *Op.Cit*
- ¹³ www.academia.edu: Mengubah dan Membentuk IAIN: Profil Mukti Ali
- ¹⁴ Argumen ini dikemukakan oleh Prof. Rasjidi dalam satu tulisannya yang disampaikan dalam Pidato Sambutan Musyawarah Antar Agama, 30 November 1967 di Jakarta. Penulis mendapati tulisan ini dari dua sumber, yakni di dalam Majalah *Al-Djami'ah*, Nomor Khusus, Mei 1968- Tahun ke VIII dan buku karangan Umar Hasyim *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*. Dalam konteks ini, penulis memfokuskan diri dari sumber yang pertama
- ¹⁵ M. Rasjidi, *Al-Djami'ah*, Nomor Khusus, Mei 1968 Tahun ke VIII, hlm.35
- ¹⁶ *Ibid.*
- ¹⁷ *Ibid.*
- ¹⁸ Mukti Ali, "Dialog between Muslims and Christians in Indonesia and its Problems" dalam *Al-Jami'ah*, No. 4 Th. XI Juli 1970, hlm. 55.
- ¹⁹ A. Mukti Ali, "Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi", dalam Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (red.), *Ilmu Perbandingan agama di Indonesia dan Belanda*, (Jakarta: INIS, 1992), hlm. 227-229.
- ²⁰ *Ibid.*, hlm. 230.
- ²¹ Djohan Effendi, "Dialog Antar Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan?" dalam *Majalah Prisma 5*, Juni 1978, hlm. 16. Lihat juga Djohan Effendi, "Kemusliman dan Kemajemukan Agama" dalam Th. Sumarthana dkk. (ed.), *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, hlm. 54-58.
- ²² Lihat Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*, pent. Nanang Tahqiq (Jakarta: Paramadina, 1999), cet. I, hlm. 237.
- ²³ Djohan Effendi, "Dialog Antar Agama", hlm. 16. Paragraf ini juga pernah dikutip oleh Greg Barton. Lihat Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal*,

- hlm. 239.
- ²⁴ Djohan Effendi, "Dialog Antar Agama", hlm. 17.
- ²⁵ *Ibid.* Paragraf ini juga pernah dikutip oleh Greg Barton. Lihat Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal*, hlm. 243.
- ²⁶ Q.S. Al-Baqarah (2) : 156.
- ²⁷ Q.S. Al-Kahfi (18) : 29
- ²⁸ Djohan Effendi, "Kemusliman dan Kemajemukan", hlm. 54-55.
- ²⁹ Q.S. Al-Hajj (22) : 40.
- ³⁰ Paragraf itu merupakan komentar Nurcholish Madjid yang dicantumkan dalam buku *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog "Bebas" Konflik*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 259.
- ³¹ Tulisan Nurcholish Madjid yang penuh dengan nuansa dialog ini disampaikan di Taman Ismail Marzuki 21 Oktober 1992, *Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan untuk Generasi Mendatang*. Pengamatan terhadap realitas pluralitas umat menjadi perhatian serius. Sebagaimana judulnya, ia mengupas bagaimana generasi mendatang menjalankan kehidupan beragama. Kata *generasi mendatang* adalah kata yang masih umum yang tidak perlu dikotak hanya dalam generasi Islam. Dalam tulisannya itu, Nurcholish ingin melaksanakan kandungan hadis yang menyatakan "agama adalah pesan" (*al-din al-nashihah*). Lihat Nurcholish Madjid, "Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan untuk Generasi Mendatang", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No.1 Vol.IV, Th. 1993, hlm. 4 dan 6.
- ³² Faktor-faktor selain agama, misalnya, adalah faktor kebangsaan, kesukuan, kebahasaan, kesenjangan ekonomi, kesejarahan, kekuasaan teritorial, dan sebagainya.
- ³³ Nurcholish Madjid, "Beberapa Renungan", hlm. 7-8.
- ³⁴ *Ibid.*, hlm. 8.
- ³⁵ *Ibid.*, hlm. 12
- ³⁶ *Ibid.*, hlm. 13-14
- ³⁷ Lihat Nurcholish Madjid, "Hubungan Antar Umat Beragama : Antara Ajaran dan Kenyataan", dalam W.A.L. Stokhof (red.), *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (Beberapa Permasalahan)*, (Jakarta : INIS, 1990), jilid VII, hlm. 108-109.
- ³⁸ Nurcholish Madjid, "Beberapa Renungan", hlm. 16.
- ³⁹ *Ibid.*, hlm. 19.
- ⁴⁰ Q.S. Al-Mumtahanah (60) : 8. Lihat Nurcholish Madjid, "Hubungan Antar Umat Beragama", hlm. 111.
- ⁴¹ Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan*, (Jakarta : Lappenas, 1981), hlm. 3.
- ⁴² Lihat Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal*, hlm. 398.
- ⁴³ Abdurrahman Wahid, "Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 52.
- ⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 53.
- ⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 53-54
- ⁴⁶ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung : Mizan, 1999), cet. VII, hlm. 41-43.
- ⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 43.
- ⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 67.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan*, (Jakarta : Lappenas, 1981).
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung : Mizan, 1999), cet. VII.
- Amin Abdullah, M. , “Etika dan Dialog Antar Agama: Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Ulumul Qur’an*. No. 4 Vol. IV. Th. 1993.
- Andito (ed.), *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog “Bebas” Konflik*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 259.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1993).
- Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (red.), *Ilmu Perbandingan agama di Indonesia dan Belanda*, (Jakarta : INIS, 1992).
- Chadijah Nasution, *Sejarah dan Perkembangan Dakwah Islam* (Yogyakarta : Ideal Offset, 1978).
- Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid*, Djohan Effeni, *Abmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*, pent. Nanang Tahqiq (Jakarta : Paramadina, 1999), cet. I.
- Guillaume, A., *The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq’s Sirat Rasul Allah*, (Karachi : Oxford University Press, 1970).
- Hasan Ibrahim Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj. Djah dan Humam (Yogyakarta : Kota Kembang, 1989).
- Huntington, Samuel P., “Benturan Antar Peradaban, Masa Depan Politik Dunia?” dalam *Jurnal Ulumul Qur’an*, No. 5, Vol.IV Tahun 1993.
- Ismail Raji al-Faruqi (ed.), *Trialog Tiga Agama Besar: Yahudi, Kristen, Islam*, alih bahasa Joko Susilo Kahhar dan Supriyanto Abdullah, Cet. I (Surabaya : Pustaka Progressif, 1994).
- Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998).
- Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998).
- Majalah *Al-Djami’ah*, Nomor Khusus, Mei 1968- Tahun ke VIII.
- Majalah Prisma* 5, Juni 1978.
- Michael H. Hart, *Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, terj. Mahbub Djunaedi (Jakarta : Pustaka Jaya, 1990), cet. XII.
- Montgomery Watt, W., *Muhammad at Medina* (London : Oxford University Press, 1956).
- Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Audah (Jakarta : Tintamas, 1984).
- Mukti Ali, A., “Dialog between Muslims and Christians in Indonesia and its Problems” dalam *Al-Jami’ah*, No. 4 Th. XI Juli 1970.
- Mursyid Ali (ed.), *Studi Agama-Agama di Perguruan Tinggi, Bingkai Sosio-Kultural Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta : Balitbang Depag RI, 1998/1999).
- Mursyid Ali (ed.), *Studi Agama-Agama di Perguruan Tinggi, Bingkai Sosio-Kultural Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta : Balitbang

- Depag RI, 1998/1999).
- Nasir Tamara, M. dan Elza Pelda Taher (ed.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban* (Jakarta : Yayasan Paramadina, 1996).
- Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-jeram Peradaban Muslim* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996).
- Nurcholish Madjid, “Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan untuk Generasi Mendatang”, dalam *Jurnal Ulumul Qur’an*, No.1 Vol.IV, Th. 1993.
- Parliament of the World’s Religions, *Declaration Toward a Global Ethic* (Chicago : t.t.).
- Sjalabi, A., *Sedjarah dan Kebudajaan Islam* (Djakarta : Djajamurni, 1970).
- Stokhof, W.A.L. (red.), *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (Beberapa Permasalahan)*, (Jakarta : INIS, 1990), jilid VII.
- Sumarthana, Th. dkk. (ed.), *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*.
- Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, t.t.).
- Zainul Abas, “Dialog Agama, Pluralitas Budaya dan Visi Perdamaian”, dalam *Kompas*, No. 213 Tahun Ke-32, 31 Januari 1997.

Tentang Penulis

Khairah Husin Khairiah Husin adalah Dosen pada Fakultas Ushuluddin UIN Riau. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Perbandingan Agama IAIN SUSQA Pekanbaru. Pendidikan S2 pada Jurusan Pemikiran Islam Asia Tenggara di IAIN SUSQA Pekanbaru.